

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Yosefrinaldi (2013)

Penelitian Yosefrinaldi (2013) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) ialah sama-sama menggunakan kualitas LKPD sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya ialah:

1. Penelitian ini menggunakan 19 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) se-Sumatera Barat. Setiap sampel masing-masing terdiri dari lima responden sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti menggunakan 20 SKPD di Kota Surabaya.
2. Penelitian ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel independen tersebut.
3. Penelitian ini menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel intervensi sedangkan peneliti menggunakan variabel tersebut sebagai variabel moderasi.

b. Lilis Setyowati dan Wikan Isthika (2014)

Penelitian Lilis Setyowati dan Wikan Isthika (2014) menguji tentang “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas

laporan keuangan daerah Kota Semarang. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang. Peran internal audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati dan Wikan Isthika (2014) ialah sama-sama menggunakan kualitas LKPD sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya ialah:

1. Penelitian ini menggunakan 13 SKPD di Kota Semarang yang berjumlah 33 responden pegawai bagian keuangan di setiap SKPD sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti menggunakan 20 SKPD di Kota Surabaya.
2. Penelitian ini tidak menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi sedangkan peneliti menggunakan variabel moderasi tersebut.

c. Akhmad Syarifudin (2014)

Penelitian Akhmad Syarifudin (2014) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan peran audit internal terhadap kualitas LKPD setempat baik secara langsung maupun dimediasi oleh SPIP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Peran audit internal tidak berpengaruh

signifikan terhadap kualitas LKPD. SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap SPIP. Peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap SPIP. SPIP dapat memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD. SPIP tidak memediasi pengaruh peran audit internal terhadap kualitas LKPD.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syarifudin (2014) ialah sama-sama menggunakan kualitas LKPD sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya ialah:

1. Penelitian ini menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen dengan $29 \text{ SKPD} \times 5 = 145$ sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti menggunakan 20 SKPD di Kota Surabaya.
2. Penelitian ini tidak menggunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti menggunakan variabel independen tersebut.
3. Penelitian ini menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel intervensi sedangkan peneliti menggunakan variabel tersebut sebagai variabel moderasi.

d. M. Ali Fikri, Biana Adha Inapty, dan RR. Sri Pancawati Martiningsih (2015)

Penelitian M. Ali Fikri, Biana Adha Inapty, dan RR. Sri Pancawati Martiningsih (2015) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas

Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD Di Pemrov. NTB)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD serta untuk memberikan bukti empiris tentang sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Fikri, Biana Adha Inapty, dan RR. Sri Pancawati Martiningsih (2015) ialah sama-sama menggunakan kualitas LKPD sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya ialah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dari 36 SKPD di Provinsi NTB sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti menggunakan 20 SKPD di Kota Surabaya.
2. Penelitian ini menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel independen sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel independen tersebut.

3. Penelitian ini tidak menggunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti menggunakan variabel independen tersebut.

e. Dewi Andini dan Yusrawati (2015)

Penelitian Dewi Andini dan Yusrawati (2015) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andini dan Yusrawati (2015) ialah sama-sama menggunakan kualitas LKPD sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya ialah:

1. Penelitian ini menggunakan seluruh Dinas dengan unit analisis SDM/pegawai subbagian keuangan/akuntansi di setiap Dinas. Penentuan responden hanya pada 14 SKPD dari 27 SKPD yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Responden masing-masing diambil 3 pada setiap SKPD

sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti menggunakan 20 SKPD di Kota Surabaya.

2. Penelitian ini tidak menggunakan peran audit internal sebagai variabel independen sedangkan peneliti menggunakan variabel independen tersebut.
3. Penelitian ini tidak menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi sedangkan peneliti menggunakan variabel moderasi tersebut.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung penjelasan pada analisis dan pembahasan penelitian. Berikut landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness theory*)

Teori kegunaan keputusan pada informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan para pembuat informasi akuntansi yang bertugas menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan ekonomi yang baik. Pihak

yang berkepentingan dalam arti para pengguna/pemakai laporan keuangan (Staubus, 2000 dalam Endang, 2011).

Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya komponen seperti SDM yang kompeten, penerapan sistem akuntansi memadai, dan peran audit internal yang profesional, serta dengan didukung pengendalian internal yang baik, maka kualitas informasi laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi akan semakin baik sehingga mencakup sesuai standar akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi nilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna/pemakai informasi tersebut.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Individu yang mempunyai kompetensi akan bekerja dengan keterampilan dan pengetahuannya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, cepat, dan dengan pengalaman dibidang yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat mengurangi kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga sejalan dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan PP No. 101 Tahun 2000 bahwa, kompetensi ialah karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh SDM maupun aparatur berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Selain itu, individu yang berkompeten dapat ditinjau dengan seberapa baik individu tersebut dalam menjalani pelatihan kerja supaya siap melayani kebutuhan pemangku kepentingan.

c. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa SAKD adalah Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan penggolongan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bukti atas setiap transaksi yang dilakukan, lalu dilakukan pencatatan secara kronologis atas transaksi yang terjadi, selanjutnya dilakukan penggolongan sesuai dengan pos-pos yang sudah diatur, dan dibuatlah laporan keuangan Daerah guna pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan. Kepala Daerah menetapkan SAKD berfokus pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang disusun dengan mengacu pada prinsip pengendalian intern. Ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan SAKD. Sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi keuangan Daerah secara garis besar terdiri dari empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, dan selain kas (Abdul, 2007).

d. Peran Audit Internal

Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pengawasan internal ialah semua proses kegiatan audit yang mulai *review*, evaluasi dan penilaian, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang positif bahwa kegiatan telah diselenggarakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini cenderung pada persepsi dari aparatur/SDM yang bekerja di lingkungan Pemda. Peran audit internal dianggap baik menurut pandangan dari aparatur/SDM yang menyusun laporan keuangan ketika dalam penugasannya auditor internal yang disebut Inspektorat bekerja secara profesional dan objektif dalam melakukan penilaian keandalan informasi keuangan, penilaian ketaatan maupun kinerja, serta penilaian efisiensi dan efektifitas program yang telah direncanakan oleh pihak yang diaudit.

e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sesuai PP No. 60 Tahun 2008, bahwa Pemerintah menyelenggarakan SPIP dalam rangka pengelolaan keuangan Negara. Sistem pengendalian internal Pemerintah ialah proses tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, sistem pengendalian internal harus terintegrasi dengan baik supaya dapat dipercaya tingkat keandalan datanya. Faktor ketepatan waktu dalam memposting data maupun otorisasi dokumen transaksi harus diperhatikan sehingga sistem yang berjalan tidak

mengalami kebocoran. Untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik, maka dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada aparatur yang berkompeten.

f. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, kualitas LKPD dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ialah ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Berikut adalah prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang diinginkan menurut PP No. 71 Tahun 2010:

1. Relevan, yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
 2. Andal, yaitu informasi yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netral.
 3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya.
- Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut

terhadap pengambilan keputusan. Maka, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna/pemakai.

g. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD

Kompetensi merupakan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi aparatur di Pemerintah Daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparatur berupa keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di bidangnya. Aparatur/SDM yang kompeten dari segi kuantitas dan kualitas harus memiliki kualifikasi dibidang akuntansi sehingga aparatur tersebut dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Adanya kompetensi dibidang akuntansi akan meningkatkan nilai informasi dalam pelaporan keuangan Pemda (Tantriani, 2012).

h. Pengaruh Penerapan SAKD Terhadap Kualitas LKPD

Sistem akuntansi keuangan Daerah yang dibuat dalam rangka menjamin siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, tetapi ketika terdapat masalah pada salah satu bagian saja dari sistem akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pada dasarnya, sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan apabila ada salah satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif LKPD (As Syifa dan Dul Muid, 2014). Oleh karena itu,

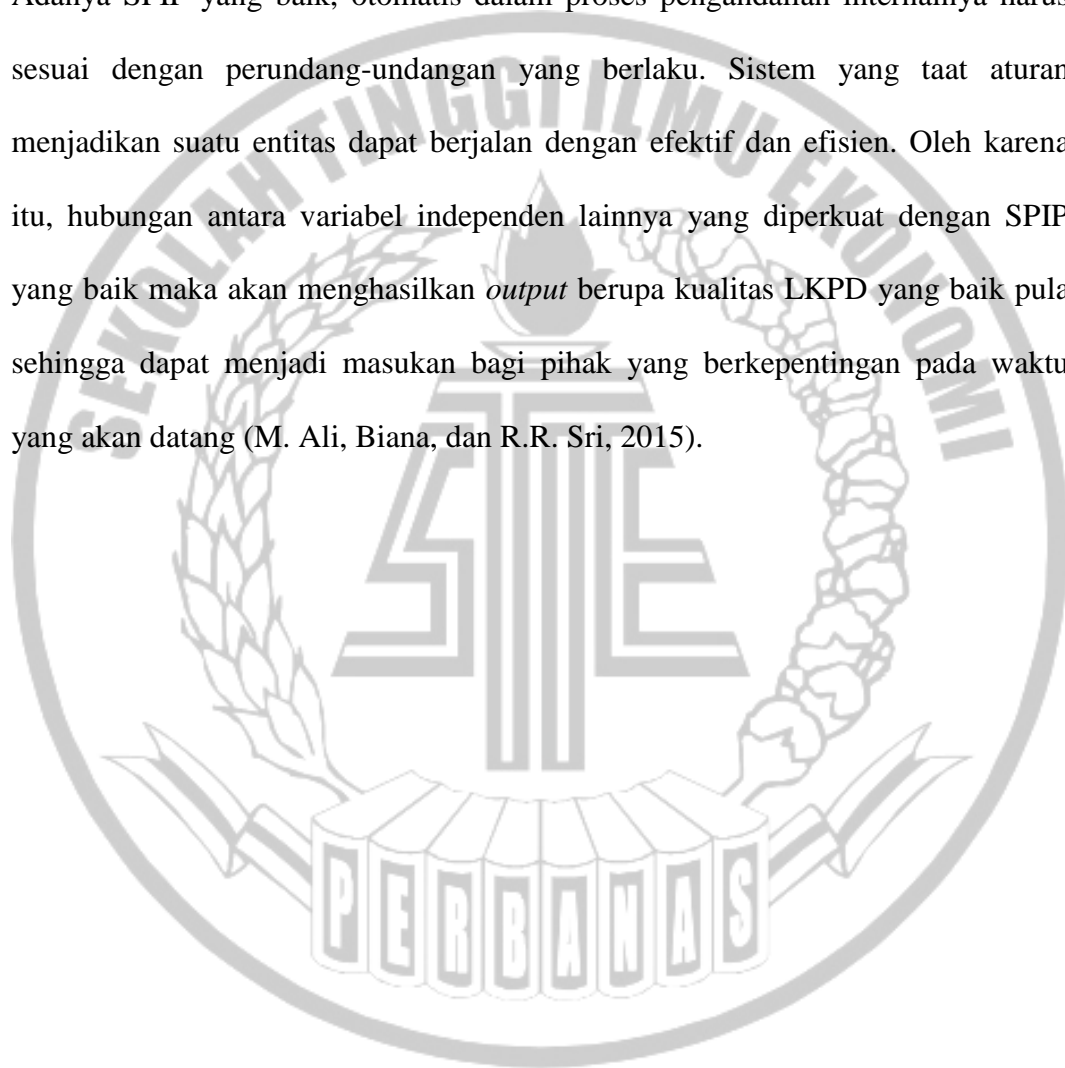
SAKD yang memadai harus tersusun secara sistematis mulai dari awal pengumpulan data sampai dengan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar otomatis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

i. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas LKPD

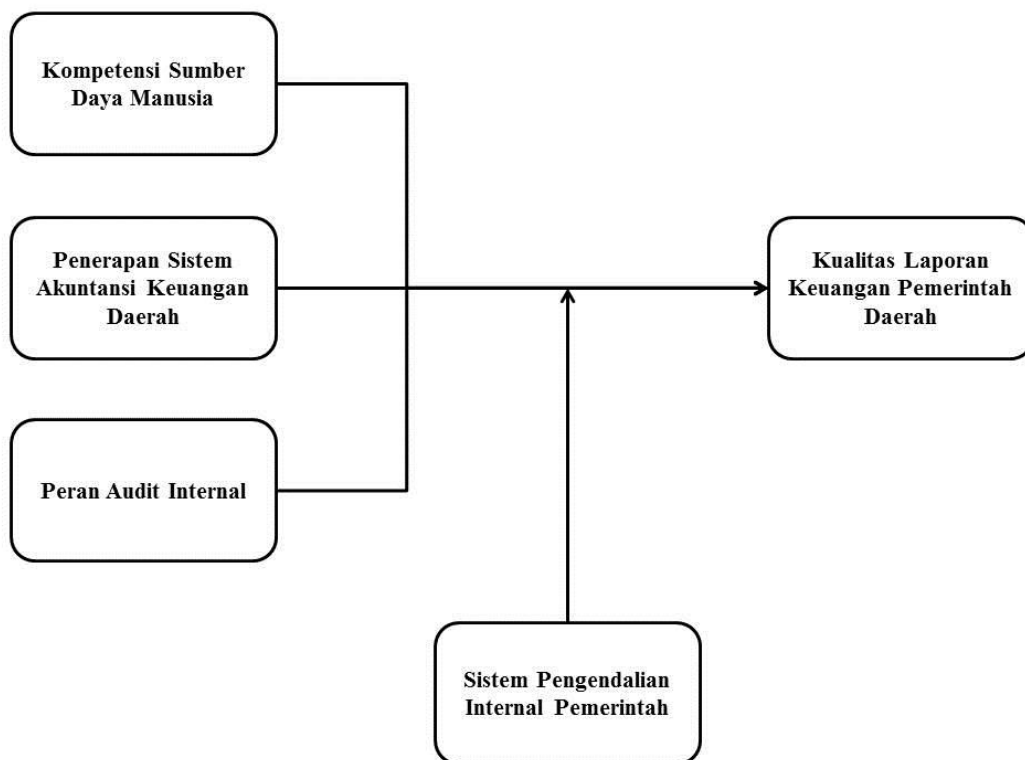
Auditor internal ialah salah satu profesi yang menunjang terciptanya tata kelola yang baik dan telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan Instansi secara efektif dan efisien. Berdasarkan persepsi dari aparatur/SDM yang bertugas menyusun laporan keuangan yang nantinya akan diperiksa oleh Inspektorat, maka diharapkan adanya kontribusi yang baik dari BPK/Inspektorat selaku auditor internal. Dapat ditinjau pula melalui proses kegiatan pengawasan sampai dengan pemberian opini terhadap LKPD yang disajikan oleh Instansi-Instansi Pemerintah, sehingga auditor internal harus profesional dan objektif dalam *mereview* maupun penilaian kinerja keuangan sampai pada memberikan opini publik. Oleh karena itu, profesionalitas maupun sikap yang objektif dalam menilai kinerja maupun program dari auditor internal akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pemda (M. Ali, Biana, dan R.R. Sri, 2015).

j. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas LKPD Dengan Dimoderasi SPIP

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Adanya SPIP yang baik, otomatis dalam proses pengendalian internalnya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sistem yang taat aturan menjadikan suatu entitas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan antara variabel independen lainnya yang diperkuat dengan SPIP yang baik maka akan menghasilkan *output* berupa kualitas LKPD yang baik pula sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan pada waktu yang akan datang (M. Ali, Biana, dan R.R. Sri, 2015).



2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

- H1** : Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD.
- H2** : Penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD.
- H3** : Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD.
- H4** : Sistem pengendalian internal Pemerintah memoderasi secara kuat pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, dan peran audit internal terhadap Kualitas LKPD.